

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**  
**ANNISA AZIZ**  
**2010012111234**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

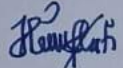
**No. Reg: 11/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg: 11/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Annisa Aziz  
NPM : 2010012111234  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jembatan Di Kabupaten Padang Pariaman


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing)  (.....)

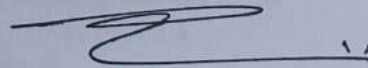
Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H )

# PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Annisa Aziz<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [azizannisa225@gmail.com](mailto:azizannisa225@gmail.com)

## ABSTRACT

*Article 2 Paragraph (1) of the Padang Pariaman Regent's Regulation Number 61 of 2021 states that the Public Works and Spatial Planning Service (PUPR Service) is the implementing element for government affairs in the field of public works and spatial planning which is the authority of the region. The function of the PUPR Service is to carry out supervision over the construction and rehabilitation of bridges in Padang Pariaman Regency. Problem formulation 1). What is the role of the PUPR Service in supervising the construction and rehabilitation of bridges in Padang Pariaman Regency? 2). What are the obstacles faced by the PUPR Service in carrying out supervision of bridge construction and rehabilitation in Padang Pariaman Regency? 3). What are the efforts made by the PUPR Service to overcome obstacles in implementing supervision of bridge construction and rehabilitation in Padang Pariaman Regency? The type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data, data analyzed qualitatively. Conclusions 1) The PUPR Service supervises the planning, implementation and maintenance stages of bridge construction and rehabilitation. 2) The obstacles faced by the PUPR Service in supervising bridge construction and rehabilitation are lack of budget and strong river flows which result in disruption to bridge construction. 3) Efforts made by the PUPR Service to overcome obstacles in monitoring bridge construction and rehabilitation, namely carrying out re-budgeting and coordinating with the River Basin Center (BWS).*

**Keywords:** *Role, Service, Supervision, Construction and Rehabilitation of Bridge*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang mana dalam sistem ini presiden selaku kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diberi amanat oleh rakyat dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk menjalankan amanat rakyat dan mewujudkan tujuan negara, pemerintah haruslah memiliki

arah dalam melaksanakan pemerintahannya.

Perkembangan zaman menghendaki kehidupan yang sesuai dengan kaidah tatanan pemerintahan yang teratur supaya agenda reformasi dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintahan akan terlaksana dengan baik apabila sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan guna menjamin keseimbangan kekuasaan, dan pembagian itu berupa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif<sup>1</sup>. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk membahas salah satu peranan dari cabang kekuasaan eksekutif, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

---

<sup>1</sup> Andi Pangerang Moenta, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta

yang selanjutnya disebut dengan Dinas PUPR.

Dinas PUPR memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dinas PUPR bekerja dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan jalan, jembatan dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.

Dinas PUPR memiliki beberapa bidang, diantaranya yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air, dan Unit Pelaksanaan Teknis. Pembagian ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efisien, kualitas proyek dapat ditingkatkan serta guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Pasal 12 huruf C Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi jembatan di Bidang Bina Marga menyelenggarakan beberapa fungsi yang salah satunya yaitu pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan.

Berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan jembatan ini, penulis telah melakukan survei terhadap beberapa jembatan di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan hasil survei lapangan tersebut penulis menemukan fakta bahwa Kabupaten Pariaman memiliki banyak jembatan dengan berbagai macam kondisi, yaitu ada jembatan dengan kontruksi yang masih bagus dan bahkan ada yang dijadikan tempat wisata, dan ada jembatan yang pembangunannya tidak sampai selesai.

Berdasarkan survei tersebut, terdapat satu jembatan yang menarik perhatian penulis yaitu Jembatan Kapecong yang terletak di Kecamatan Enam Lingsung. Jembatan Kapecong merupakan jembatan yang dibangun pada tahun 2023 lalu yang hanya di bangun fondasi kaki jembatan saja, dan pembangunan kaki jembatan tersebut

juga tidak seutuhnya, melainkan hanya di satu sisi aliran sungai saja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis telah melakukan penelitian terhadap peranan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman khususnya Bidang Bina Marga terkait dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan dengan judul **“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan Pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman.

## II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis<sup>2</sup>
2. Sumber Data  
Sumber data adalah data primer dan data sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Studi dokumen dan wawancara
4. Analisa Data  
Data di analisis secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah yang memiliki banyak aliran sungai membutuhkan jembatan sebagai penghubung wilayah yang terpisah<sup>3</sup>. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pembangunan jembatan baru yaitu jembatan Lubuak Tano yang dibangun pada tahun 2018 di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, jembatan Kapecong yang dibangun pada tahun 2023 di Kecamatan Enam Lingkung dan dua jembatan yang direhabilitasi yaitu jembatan Lubuak Napa yang direhabilitasi pada tahun 2022 di Kecamatan Padang Sago, jembatan Palupuk yang direhabilitasi pada tahun 2021 di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Dari empat jembatan tersebut Dinas PUPR telah menjalankan peranannya dalam pengawasan pada tahap perencanaan berupa pengawasan administrasi dan manajemen kontruksi, tahap pelaksanaan pembangunan dengan mengawasi persiapan pekerjaan, pengawasan material, dan mengawasi keselamatan kesehatan kerja dan tahap pemeliharaan jembatan.

### B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Padang Pariaman

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yaitu:

1. Kurangnya anggaran
2. Rusaknya daerah aliran sungai

### C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi Kendala-Kendala pada Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, Dinas PUPR telah melakukan upaya berupa:

1. Penganggaran kembali, dilakukan untuk melanjutkan pembangunan jembatan dengan APBD 2024
2. Menjalin kerjasama dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) sehingga aliran sungai dapat dikendalikan dan kerusakan kontruksi jembatan akibat gerusan air sungai dapat di minimalisir.

---

<sup>2</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

<sup>3</sup> Bambang Supriyadi, 2007, *Jembatan*, Cet 4, Beta Offset, Yogyakarta

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Peranan Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yaitu melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengawasan hingga pemeliharaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman yaitu kurangnya anggaran dan rusaknya daerah aliran sungai
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman untuk mengatasi kendala yang ditemukan yaitu melakukan penganggaran kembali dan berkoordinasi dengan pihak balai sungai untuk menganmankan aliran sungai yang rusak.

##### B. Saran

1. Agar Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan peranannya selaku lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur.
2. Agar Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan inovasi terbaru terhadap pembangunan dan rehabilitasi jembatan.
3. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang terpilih pada pemilihan legislatif 2024 dapat menganggarkan kembali pembangunan jembatan Kapecong hingga selesai.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

- Andi Pangerang Moenta, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Supriyadi, 2007, *Jembatan*, Cet 4, Beta Offset, Yogyakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

##### C. Sumber Lain

Delviana, 2022, "Pelaksanaan Kontrak Kontruksi Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan PT Bunga Raya Lestari Dalam Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Wilayah Sumbawa I", *Jurnal Private Hukum Universitas Mataram*, Vol 2, No 1

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pembimbing **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu beserta arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, Juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariari R, S.H.,M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Bung Hatta, **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta